

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir, Chaerul, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Anggara, 2019, *Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Creative Commons Attribution 4.0 International License, Jakarta,
- Atkinson, Phyllis, 2009, "Introduction" dalam *Basel Institute on Governance, Tracing Stolen Assets: A Practitioner's Handbook*, (Basel: International Centre for Asset Recovery.
- Bentham, Jeremy, 1789, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford, Clarendon Press
- Brun, Jean-Pierre, et al, 2021, *Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners*. 2nd ed. Star Initiative, Washington DC.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Greenberg, Theodore S., et. al., 2009, *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for NonConviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Hatta, Mohammad, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perakara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan kelima belas, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hart, H.L.A., 1983, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford University Press, London.
- Mariza, Prima Idwan, 2021, *Penelusuran Aliran Uang Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Kencana, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Indonesia, Red & White Publishing.
- Nelson, Febby Mutiara, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Posner, Richard A., 1998, *Economic Analysis of Law*. 5 th ed., Aspen Publishers, New York.
- Radbruch, Gustav, 1932, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, See in Robert Alexy, Gustav Radbruch's Concept of Law, *Radbruch Biography in Christiana Albertina*.

- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing.
- Ratnapala, Suri 2009, *Jurisprudence*, Cambridge University Press, New York.
- Reksodiputro, Mardjono. 2013. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rubai, Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, H., H.S. dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2021, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, cet 2, Rajawali Press, Depok.
- Satriana, Eri dan Dewi Kania Sugiharti, 2019, *Asset Recovery Dalam Pengembangan Hukum Pidana Nasional*, ed. 1, cet. 1, Keni Media. Bandung.
- Satrio, J., 1999 *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer En E. Ph. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Shavell, Steven, 2004, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Cambridge, Harvard University Press.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Siti, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetopo, Maria, "Economic Analysis of Law dan Krisis Keuangan," dalam Maria Soetopo, 2015, ed., *Economic Analysis of Law*, cet. 1, Diadit Media, Jakarta.

Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-22, Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugianto, Fajar, 2013, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum*, Kencana Preanada Media Group, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.

Tunick, Mark, 1992, *Punishment Theory and Practice*, University of California Press, Berkeley.

Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gate Keeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta.

Utama, Paku dan Frillu, Vauline, 2018, *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik*, Wikrama Utama Indonesia, Tangerang Selatan.

Widjaya, I. G. Rai, 2004, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Bekasi..

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Perpres Nomor 155 Tahun 2024 mengatur mengenai Kementerian Hukum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK No. 213/PMK. 06/2020.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-013/A/ JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

### C. Jurnal

Adewole, M.B. and Anyahara, U.C., "Adoption rate of land clearing techniques and their effects on some soil fertility parameters of an Alfisol in southwestern Nigeria". *African Journal of Environmental Economics and Management*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Butarbutar, Andika Demto, Ridwan, Reine Rofiana. "Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Mataka Corruption Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2024.

Conboy, Maria Gracia Sari Soetopo, "Integrating Law and Economics in Indonesia", *Law Review*, Vol XVIII, No. 3, Maret 2019.

Faisal dan Rustamaji, Muhammad, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2021.

- Hananta, Dwi, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2018.
- Haswandi, 2013, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana.
- Illiyani, Maulida, “Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurna Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22, No. 3, 2020.
- Karina, Fitrizia Blessi, “Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol. VI, no. 9, 2017.
- Kusuma, Shofi Nur Fajriana., “Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol.18, No. 2, 2019.
- Listyaningrum, Ragil., “Hak Merdeka Penuntut Umum dan Rencana Tuntutan dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Verstek*, Vol. 10, No. 3, 2023
- Mustari, Muh. Yusuf., Akbar. Muh., dan Hasmin, Moh. Yusuf., “Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 5, 2022.
- Mustofa, Imron, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol 6, No. 2, 2016.
- Ni'mah, Zulfatun, “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012.
- H, Ike, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)”, *Jurnal*, Universitas Brawijaya, 2014.
- Rahman, Mushthafa Izzatur dan Halili, Hasrul., “Strategi Jaksa Pengacara Negara Untuk Memulihkan Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Instrumen Hukum Keperdataan”, *Viva Justicia: Journal of Private Law*, Vol.1 No.1, 2024.

- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Singer, Ethan, “*When police mess up: The lack of a defense to inadequate police investigations*”. *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 54, No. 3, 2023.
- Siregar, Vivi Arfiani., “Analisis Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut) di Internal Kejaksaan Indonesia” *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 4 No. 2, 2020
- Steele, Lisa J., “When Investigators Stumble: Reasonable Doubt and the Lack of Evidence”, *Nacdl Journal The Champion*, Vol. 28, No. 29 Juni 2021.
- Sugiarto, Kantrey and Liana Endah Susanti, “Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Terkait Dengan Penerapan Asas Retroaktif,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, no. 2, 2017.
- Wibawanti, Erna Sri., Murjiyanto, Raden., Pratiwi, Wiwin Budi., dan Harahap, Imam Amalda Rizki., “Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, 2024, hlm. 540.
- Wicaksono, Dian Agung., Yurista, Ananda Prima., dan Sari, Almonika Cindy Fatika., “Mendudukan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Keistimewaan Yogyakarta (*Provide the Kasultanan and the Kadipaten as Subject of Property Rights toward the Land of Kasultanan and Kadipaten in the Privilege of Yogyakarta*)”, *Jurnal Rechsvinding*, Vol. 8, No. 3, Desember 2019.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq., Susmayanti, Riana., Zainudin, Arif., “Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Pasal 2 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juni, 2014

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4857K/Pid.Sus/2023 tanggal 25 September 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3284 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 5 Juni 2024  
Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-  
Tpk/2023/Pt Yyk Tanggal 30 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan  
Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Yyk Tanggal 19  
Oktober 2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3713 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt Yyk  
Tanggal 31 Januari 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Yyk Tanggal 28 Desember 2023

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6631 K/Pid.Sus/2024  
Tanggal 18 Oktober 2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt Yyk Tanggal 24 April 2024

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT  
YYK tanggal 15 Februari 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PT YYK  
Tanggal 31 Januari 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk  
tanggal 28 Desember 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Yyk  
Tanggal 20 November 2024.

Keputusan Jaksa Agung Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan  
Kejaksaan RI, Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020, SOP  
Pelacakan Aset Tahap Eksekusi Angka 4.

## **E. Hasil Penelitian, Skripsi, Tesis**

Akbar, Muhammad Fatahillah 2024, “Reformulasi Keadilan Restoratif Dalam  
Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi” *Disertasi*, Fakultas  
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Martono, Sigit, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang  
Beritikad Baik Sehubungan Dengan Penyitaan dan Perampasan Aset  
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Studi  
Kasus: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.

39/Pid.Sus.TPK/2013/PN.JKT.PST),” *Skripsi*, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Kayona, Eduardo, 2020, Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa; Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pardede, Sonora Gokma. 2023, Strategi Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Tindak Pidana di Indonesia sebagai upau pengembalian Kerugian Tindak Pidana: Ditinjau dari Analisis Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law), *Tesis*, Universitas Indonesia.

Prarista, Muhammad Ibnu, 2023, “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Putusan Hakim: Antara Eksistensi dan Urgensi Pengaturan dalam Kitab Undang=Undang Hukum Pidana Baru”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ramadhan, Vito Ninggar, 2018, “Akibat Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Yang Belum Ada Serat Kekancingan Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saidi, Husain Kasim, H.M. Djafar dan Husen Alting, 2011, “Legal Awareness of Tax Obligation and Retribution towards the Increase of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago”, *Paper*, Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar.

Santoso, Topo, 1999, “Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana pada Periode Sebelum dan Sesudah berlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Tesis*, Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Suud, Aghia Khumaesi, 2019, “Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan dalam Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Tien, Mas Anienda F, Mohammad Jamin, Yudho Taruno Murtanto, 2024, *Universal Principles of Foundations in Economic Analysis of Law Theory*, Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023), Advances in Social Science, Education and Humanities Research.

## F. Lain-lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, “*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”.

Cnn Indonesia, 2023, “Cerita Getir Pensiunan Tertipu Kavling HGB di Tanah Kas Desa DIY”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230527150804-20-954747/cerita-getir-pensiunan-tertipu-kavling-hgb-di-tanah-kas-desa-diy>, diakses pada 15 Mei 2025.

Hadedanil, 2015, “Historis/Sejarah Pertanahan Jogjakarta”, <https://Ivaa-Online.Org/Program/Historis-Sejarah-Pertanahan-Jogjakarta/>, Diakses Pada 11 Oktober 2024.

Harga Bongkar Bangunan per m<sup>2</sup> tersedia pada <https://www.kerajaanaspal.co.id/harga-bongkar-bangunan-per-m2/>

Kompas, [https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/29/jadi-badan-pusat-pemulihan-aset-diharapkan-lebih-serius-tangani-korban%20kejahatan?status=sukses\\_login&status\\_login=login&loc=hard\\_paywall](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/29/jadi-badan-pusat-pemulihan-aset-diharapkan-lebih-serius-tangani-korban%20kejahatan?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall)

Ilham dan Reni Ridarineni, “Banyak Tanah Kas Desa di DIY Disewakan Tanpa Izin”, <https://news.republika.co.id/berita/o66ovn361/banyak-tanah-kas-desa-di-diy-disewakan-tanpa-izin>, diakses pada 12 September 2024.

[Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara](https://story.kejaksaan.go.id/inovasi/jaksa-agung-bahas-pembentukan-badan-pemulihan-aset-dengan-menpan-rb-bisa-percepat-penyelamatan-aset-negara-83061-mvk.html?screen=2), dalam <https://story.kejaksaan.go.id/inovasi/jaksa-agung-bahas-pembentukan-badan-pemulihan-aset-dengan-menpan-rb-bisa-percepat-penyelamatan-aset-negara-83061-mvk.html?screen=2>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aset,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia pada <https://kbbi.web.id/aset>, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum*, BPHN, Jakarta.

Legal Information Institute, “Asset,” Cornell Law School, Juni 2021, tersedia pada <https://www.law.cornell.edu/wex/asset>, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana versi 17 April 2023.